

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Keterhambatan distribusi bantuan pangan FAO di Sudan Selatan merupakan penyebab salah satu bentuk dari krisis pangan yang berkepanjangan di Sudan Selatan hingga saat ini sejak terjadinya konflik internal pada bulan Desember 2013. Berdasarkan pendekatan post-kolonialisme yang menekankan adanya pengaruh unsur warisan kolonial, tindakan pemerintah Sudan Selatan yang menghalangi atau menghambat bantuan FAO dalam mengatasi krisis pangan diidentifikasi karena beberapa hal yang berkaitan dengan pembentukan karakter pemerintah domestik Sudan Selatan di masa lampau saat dikolonialisasi oleh Inggris. Adapun warisan kolonial yang dibawa Inggris kepada Sudan Selatan adalah pembagian etnis dan transformasi relasi produksi.

Pembagian etnis di Sudan Selatan tercipta ketika *British-Egyptian Condominium* mulai memisah Sudan bagian Utara dan Sudan Selatan yang memunculkan perang sipil di antara kedua negara tersebut serta terpecahnya beberapa etnis di wilayah Sudan Selatan. Sudan Selatan memiliki berbagai variasi kelompok etnis. Adapun jumlah kelompok etnis di Sudan Selatan berjumlah 65 kelompok etnis. Namun, di Sudan Selatan didominasi oleh dua etnis yang berkuasa dan berpengaruh yakni etnis Dinka dan etnis Nuer. Etnis Dinka dan etnis Nuer merupakan etnis yang diidentifikasi saling bertolak belakang dan berlawanan dalam penentuan keputusan pemerintah atau politik di Sudan Selatan. Terciptanya perlawanan antar kedua etnis tersebut telah terjadi ketika Inggris mulai masuk di

Sudan Selatan. Etnis Dinka diidentifikasi mendukung dan menerima akomodasi dari Inggris, sementara etnis Nuer bertolak belakang dengan aturan Inggris sejak kolonialisasi. Hal tersebut dianggap menjadi langkah awal dari bentuk oposisi atau perlawanan dari etnis Nuer.

Adanya pembagian etnis di Sudan Selatan pada masa kolonialisasi tersebut berdampak kepada terciptanya dominasi etnis, yakni etnis Dinka dan Nuer. Dominasi dari dua etnis tersebut telah mengkonstruksi identitas politik dan pemerintah di Sudan Selatan. Hal tersebut dilihat pada SPLM yang merupakan sebuah partai yang diketuai oleh Presiden Salva Kiir, beretnis Dinka, di mana SPLM diindikasikan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di Sudan Selatan. Adapun partai oposisi dari SPLM tersebut adalah SPLM/A-IO, yang diketuai oleh mantan Wakil Presiden Salva Kiir, yakni Riek Machar, yang beretnis Nuer. Di samping itu, perseteruan antar elite pemerintah dan masing-masing kelompok pendukung tersebut telah menambah kekacauan di Sudan Selatan hingga menimbulkan krisis pangan berkepanjangan sejak konflik internal terjadi pada bulan Desember 2013. Di tambah lagi, perseteruan antar elite beserta kelompok pendukung tersebut, terutama pada pemerintah Presiden Salva Kiir dan komunitas etnis Dinka di SPLM/A dianggap membentuk tindakan hambatan dari pemerintah Sudan Selatan kepada agensi bantuan internasional, salah satunya kepada FAO, di mana memperpanjang krisis pangan yang bertambah parah di Sudan Selatan hingga era kontemporer.

Selain pembagian etnis, warisan kolonial dari Inggris lainnya adalah transformasi produksi agrikultur dan minyak di Sudan Selatan. Adapun permintaan (*demand*) yang tinggi dari Inggris terhadap Sudan Selatan sejak masa revolusi

terhadap bahan-bahan agrikultur mempengaruhi orientasi produksi agrikultur di Sudan Selatan. Adapun orientasi dari transformasi produksi agrikultur tersebut, Sudan Selatan diidentifikasi kurang “*market-oriented*” dalam memasarkan bahan produksi. Kegiatan produksi agrikultur Sudan Selatan berfokus kepada penemuan kebutuhan negara-negara Barat. Hal tersebut mempengaruhi produksi agrikultur Sudan Selatan yang diidentifikasi masih terbelakang dan *chaos* seiring bertambahnya konflik internal di Sudan Selatan.

Selain itu, Sudan Selatan merupakan negara yang sangat bergantung terhadap produksi minyak dalam pengembangan ekonominya. Namun, sejak terjadi konflik sipil antara Sudan bagian Utara dan Sudan bagian Selatan dalam pembagian pendapatan dan eksploitasi minyak yang tidak mendapat kontrol pemerintahan dengan ketat di Sudan Selatan, telah menjatuhkan harga minyak dan perekonomian Sudan Selatan yang sangat besar serta menciptakan krisis lainnya termasuk krisis akan kebutuhan keamanan pangan di Sudan Selatan.

Sehingga, untuk menjelaskan mengapa pemerintah Sudan Selatan menghalangi bantuan FAO terhadap krisis pangan di tahun 2014, dikarenakan terdapat alasan yang dipengaruhi dari unsur warisan kolonial dari Inggris yang pernah memegang kekuasaan atau otonomi administratif di Sudan Selatan. Warisan kolonial tersebut adalah pembagian etnis dan transformasi relasi produksi hingga memberikan dampak kepada kurangnya penghargaan hak-hak minoritas di Sudan Selatan. Warisan kolonial dari pembagian etnis diidentifikasi sangat berperan dalam pembentukan keputusan pemerintahan Sudan Selatan, yang mana hal tersebut disebabkan pembagian etnis di Sudan Selatan oleh Inggris sejak masa kolonisasi tidak terlalu mendapat kontrol dari Inggris dan memunculkan dominasi

etnis di Sudan Selatan hingga berdampak kepada pembentukan identitas politik yang mempengaruhi keputusan dan tindakan dari pemerintah Sudan Selatan dengan bukti dominasi etnis Dinka menguasai keputusan pemerintah sebanyak 70% bersama SPLM. Di tambah lagi, dominasi etnis tersebut dinilai tidak mempertimbangkan hak-hak minoritas untuk memperoleh bantuan dari kondisi tidak aman pangan di Sudan Selatan. Hal tersebut terbukti dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam membatasi distribusi bantuan dari pendonor ke Sudan Selatan yang dikenal dengan "*selective geographic programming*".

5.2. Saran

Permasalahan krisis pangan di Sudan Selatan hingga saat ini yang masih belum dapat diatasi karena disebabkan oleh konflik internal politik yang masih terus berlangsung di Sudan Selatan dan menjadi hambatan bagi FAO dalam mengatasi permasalahan krisis pangan di Sudan Selatan. Oleh karenanya, berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan FAO berperan sebagai mediator yang dapat melakukan program rekonsiliasi inter-etnis Sudan Selatan sebagai bentuk promosi perwujudan perdamaian di Sudan Selatan.

Berangkat dari saran tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang belum terjawab dari penelitian ini. Seperti contoh, bentuk mediasi apa atau konsep mediasi apa yang tepat yang dapat digunakan oleh FAO dalam meresolusi konflik etnis di Sudan Selatan.

